



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

**LAPORAN KEGIATAN
ANALISIS DATA
HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA
ATAS PELAKSANAAN KONTRAK
KERJA SAMA HULU MIGAS
TAHUN BUKU 2019**

DIDDY ROSSIANDI
DIKLAT *DATA ANALYTIC FOR AUDIT*
BATCH 2
DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN MATERI	iii
BAB I DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN	1
A. Gambaran Umum Topik Pengawasan	1
B. Tujuan Pengawasan	2
C. Identitas Obyek Pengawasan	2
D. Matriks Desain Pengawasan	2
BAB II KEGIATAN ANALISIS DATA	
A. Kegiatan Analisis Data	
B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya	
BAB III PENUTUP	
A. KESIMPULAN	
B. REKOMENDASI	
LAMPIRAN	

RINGKASAN MATERI

Pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (KPP Migas), BPKP, dan SKK Migas diharapkan dapat mengamankan penerimaan negara serta memberikan kepastian hukum bagi pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sehingga dapat mendorong iklim investasi di industri hulu minyak dan gas bumi. Kami mencoba mengimplementasikan hasil diklat *Data Analytic For Audit* ke dalam topik KKKS atas temuan hasil pemeriksaan bersama yang dilaksanakan pada periode tahun buku 2019.

Dengan adanya pemeriksaan bersama, maka prinsip *uniformity* dapat dipenuhi yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah sama dengan biaya yang dikembalikan kepada kontraktor serta merupakan biaya yang menjadi dasar dalam penghitungan bagi hasil dan pajak.

Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif atas profil kinerja KKKS dan analisis rasio atas temuan hasil pengawasan. Hasil analisis data dalam laporan ini diharapkan bermanfaat dalam membantu pelaksanaan pengawasan selanjutnya.

BAB I

DATA UMUM OBYEK PENGAWASAN

A. Gambaran Umum Topik Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan perubahannya, pemeriksaan dilakukan bersama oleh tiga instansi; Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal ini KPP Migas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang selanjutnya disebut sebagai Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama (“Satgas Pemeriksaan Bersama”).

Pemeriksaan Bersama adalah serangkaian kegiatan mencari, menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan Satgas Pemeriksaan Bersama secara objektif dan profesional terhadap Kontraktor yang bertindak sebagai operator atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan pengembalian Biaya Operasi di bidang usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi hasil dan PPh Migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan Bersama dilakukan atas pemenuhan kewajiban bagi hasil dan PPh Migas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pada laporan kegiatan ini akan diuraikan mengenai analisis deskriptif terhadap hasil pemeriksaan bersama atas pelaksanaan kontrak kerja sama hulu migas tahun buku 2019 menggunakan *dashboard Microsoft Excell* dan *Microsoft Power BI Desktop*.

B. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi hasil dan PPh Migas antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kontraktor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama.

C. Identitas Obyek Pengawasan

Obyek pengawasan merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan SKK Migas.

D. Matriks Desain Pengawasan

No	Pertanyaan Audit	Kriteria Digunakan	Informasi Dibutuhkan dan Sumber	Metode/Teknik Pengumpulan Informasi	Metode Analisis Dipergunakan	Keterbatasan/ Risiko	Antisipasi Risiko	insilwas
1	1. Bagaimana pemenuhan kewajiban bagi hasil dan PPh Migas oleh KKKS?	1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi 2. Production Sharing Contract (PSC) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 27 Tahun 2017	Informasi yang dibutuhkan: - data <i>finance</i> - data produksi & <i>lifting</i> - data kontrak, <i>service order</i> & <i>purchase order</i> - data bagi hasil migas Sumber: <i>Production Sharing Contract (PSC), Financial Quarterly Report (FQR), General Ledger (G/L)</i>	1. Reviu dokumen 2. Telaah Peraturan 3. Wawancara	1. Analisis deskriptif 2. Analisis perbandingan	1. Data tidak diperoleh / kesulitan akses data	FGD analisis profil dan risiko	Simpulan pemenuhan kewajiban bagi hasil dan PPh Migas
2	2. Apakah terdapat indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan?	1. Production Sharing Contract (PSC) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 27 Tahun 2017	Informasi yang dibutuhkan: - data realisasi kontrak - faktur pajak - data <i>inventory</i> & <i>asset</i> Sumber: Daftar Kontrak PBJ, Invoice dan bukti pendukung atas transaksi pada G/L	1. Reviu dokumen 2. Telaah Peraturan 3. Wawancara	1. Analisis deskriptif 2. Analisis Perbandingan	1. Data tidak diperoleh / kesulitan akses data	FGD analisis profil dan risiko	Daftar temuan hasil pemeriksaan bersama

BAB II

KEGIATAN ANALISIS DATA

A. Kegiatan Analisis Data

Kegiatan analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Data Extraction and Transform*

Tahap ini merupakan tahapan untuk memperoleh dataset berupa data temuan hasil pengawasan dan profil kinerja KKKS yang dilaksanakan pada periode tahun buku 2019 oleh Tim Pemeriksaan Bersama. Setelah data diperoleh, dilakukan pembersihan (*cleansing*) dan penataan data. Berbagai kelemahan data seperti ketidaksesuaian format field data atau lainnya di-*transform* hingga sesuai dengan kebutuhan saat analisis data.

2. *Analysis*

Tahap ini merupakan tahapan pembuatan model analisis yang dibutuhkan. Model analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif atas profil kinerja KKKS dan analisis rasio atas temuan hasil pengawasan.

3. *Report*

Pelaporan hasil analisis dituangkan dalam bentuk *Dashboard Analisis Temuan Tahun Buku 2019* menggunakan tools *Microsoft Excell* dan *Microsoft Power BI Desktop*.

B. Uraian Analisis Data dan Hasilnya

1. Cleansing data temuan atas pengawasan yang dilaksanakan pada tahun buku 2019 dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
 - a. Pembersihan data yang duplikasi terutama di data Kode Temuan dan Kelompok Temuan pada KKKS Tahun Buku 2019;
 - b. Mengecek kembali tabel dengan informasi *null*, error atau tidak terisi data;
 - c. Mengeliminir data yang tidak terkait dengan proses analisis;
 - d. Melengkapi data yang masih belum lengkap.
2. Analisis deskriptif atas profil kinerja KKKS yaitu pemeringkatan 10 (sepuluh) tertinggi/*top ten* masing-masing atas capaian produksi minyak dan gas bumi serta pemenuhan kewajiban bagi hasil dan pajak berupa PPh Badan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty (PBDR), dengan hasil sebagai berikut:

a. Produksi Minyak Bumi

PRODUKSI MINYAK BUMI			
	Barel	Bopd	
1 EXXONMOBIL CEPU LTD.	79,439,047	217,641	
2 PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA	69,350,923	190,003	
3 PT PERTAMINA EP	30,007,808	82,213	
4 PT PERTAMINA HULU MAHAKAM	13,015,520	35,659	
5 PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG	6,000,399	16,439	
6 MEDCO E&P NATUNA LTD.	5,882,994	16,118	
7 PC KETAPANG II LTD.	4,073,823	11,161	
8 BOB PT BUMI SIAK PUSAKO	3,502,486	9,596	
9 PT MEDCO E&P RIMAU	2,775,253	7,603	
10 JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMOF	2,744,030	7,517	

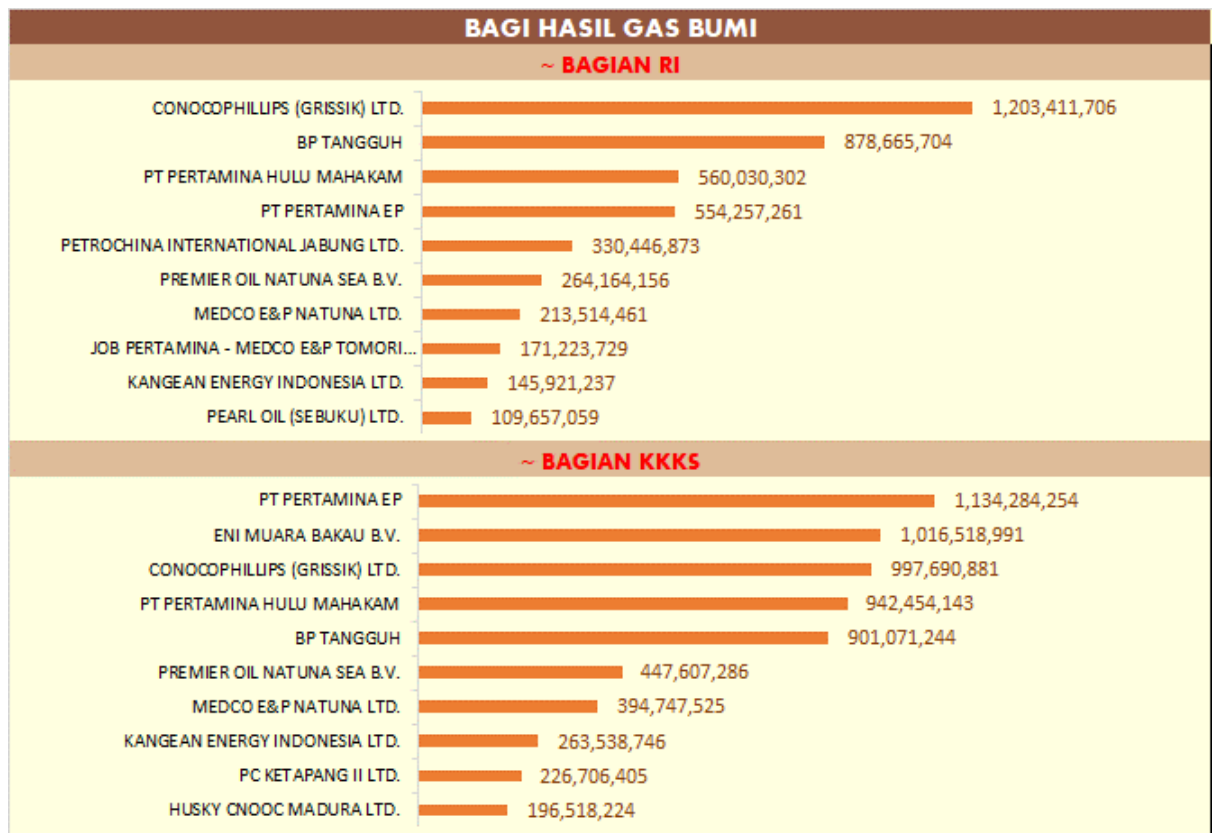
b. Produksi Gas Bumi

PRODUKSI GAS BUMI			
	Mscf	Mscf/day	
1 BP TANGGUH	471,317,226	1,291,280	
2 CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	382,555,420	1,048,097	
3 PT PERTAMINA EP	349,972,170	958,828	
4 PT PERTAMINA HULU MAHAKAM	259,513,331	710,995	
5 ENI MUARA BAKAU B.V.	208,005,290	569,878	
6 JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMOF	112,607,274	308,513	
7 PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG	94,600,725	259,180	
8 PREMIER OIL NATUNA SEA B.V.	75,322,093	206,362	
9 MEDCO E&P NATUNA LTD.	74,472,095	204,033	
10 KANGEAN ENERGY INDONESIA LTD.	63,833,934	174,887	

c. Bagi Hasil Minyak Bumi

BAGI HASIL MINYAK BUMI	
~ BAGIAN RI	
EXXONMOBIL CEPU LTD.	3,754,249,826
PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA	2,544,032,076
PT PERTAMINA EP	407,903,647
PT PERTAMINA HULU MAHAKAM	345,534,789
PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD.	222,098,255
MEDCO E&P NATUNA LTD.	212,986,278
BOB PT BUMI SIAK PUSAKO	112,861,480
PT MEDCO E&P RIMAU	97,796,254
CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	88,871,983
HUSKY CNOOC MADURA LTD.	22,251,899
~ BAGIAN KKKS	
EXXONMOBIL CEPU LTD.	1,716,721,661
PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA	1,875,763,384
PT PERTAMINA EP	1,461,958,080
PT PERTAMINA HULU MAHAKAM	468,396,994
MEDCO E&P NATUNA LTD.	147,557,213
PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD.	25,678,703
BOB PT BUMI SIAK PUSAKO	108,607,358
PT MEDCO E&P RIMAU	82,580,735
HUSKY CNOOC MADURA LTD.	123,554,678
CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	49,442,877

d. Bagi Hasil Gas Bumi

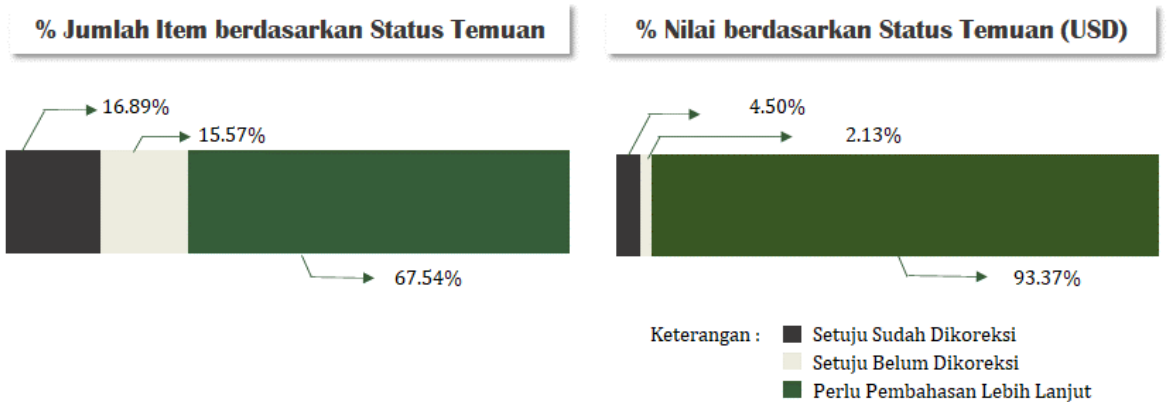


e. Pembayaran Pajak (PPh Badan dan PBDR)



3. Analisis rasio atas temuan hasil pengawasan yaitu dilakukan dengan membandingkan (persentase) antara status temuan yang disetujui dan telah dikoreksi, maupun status temuan yang disetujui namun belum

dikoreksi, dengan status temuan yang perlu pembahasan lebih lanjut, dengan hasil sebagai berikut:



Pilih 1: Perlu Pembahasan Lebih Lanjut **307 item** **\$ 234,085,298.06**

No	5 Kelompok Temuan Terbanyak	Jumlah
1	Pembebanan biaya tidak terkait operasi minyak dan gas	52 item
2	Compensation and Benefit expatriate (melebihi ketentuan)	37 item
3	Pembebanan Biaya Tidak Sesuai Kontrak	33 item
4	Pembebanan Biaya Tidak Sesuai Peraturan	16 item
5	Pembebanan Aset Tetap	15 item

No	5 Kelompok Temuan Tertinggi	Nilai
1	Kesalahan perhitungan stock, lifting, pembelian gas	\$ 49,119,291.27
2	Pembebanan Aset Tetap	\$ 48,684,586.74
3	Pembebanan Biaya Tanpa Bukti yang Cukup	\$ 37,167,249.96
4	Penyetoran Lainnya	\$ 11,956,020.00
5	Pembebanan Biaya Melebihi Budget	\$ 11,616,116.00

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Profil Kinerja KKKS berupa capaian produksi minyak dan gas bumi serta pemenuhan kewajiban bagi hasil dan pajak berupa PPh Badan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty (PBDR) dapat menjadi referensi bagi Tim Satgas Pemeriksaan Bersama dalam menentukan *sampling* audit yang akan diambil.
2. Temuan hasil pemeriksaan bersama periode tahun buku 2019 terhadap 63 KKKS menunjukkan bahwa rasio status temuan yang perlu pembahasan lebih lanjut atau belum disetujui masih sangat tinggi yakni 93,37% atau senilai US\$234,085,298.06). Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara pihak Satgas Pemeriksaan Bersama dengan pihak KKKS dalam menginterpretasikan kriteria atau ketentuan peraturan dalam pelaksanaan kontrak kerja sama. Oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan fokus oleh Tim Satgas Pemeriksaan Bersama di saat monitoring tindak lanjut hasil pengawasan. Selain itu juga diharapkan agar dapat diantisipasi terjadinya temuan yang berulang di tahun buku berikutnya;
3. Sebagai bahan masukan bagi Tim Satgas saat pelaksanaan FGD Analisis Profil dan Risiko saat penugasan KKKS pada tahun berikutnya.

B. REKOMENDASI

1. Agar Tim Satgas Pemeriksaan Bersama menyepakati kembali hal-hal yang dapat menjadi potensi temuan audit, agar dapat meminimalisir status temuan yang perlu pembahasan lebih lanjut, sehingga dapat menghindarkan dari upaya banding di tingkat arbitrase yang akan dilakukan oleh pihak KKKS.

2. Agar penetapan sampling pada audit periode tahun berjalan dilakukan dengan mempertimbangkan profil kinerja dan risiko KKKS pada periode tahun buku sebelumnya.

Mengetahui,
Penguji *Batch 2*

Sulistyo Himawan